

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (Studi Pada Wilayah Kota Bandar Lampung)

**Oleh
Mutiar Ratu**

Tindak pidana narkotika yang melibatkan anak menimbulkan perhatian khusus dalam kebijakan hukum pidana karena anak berada pada posisi yang rentan terhadap pengaruh dan eksploitasi jaringan peredaran gelap. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan kerangka hukum yang berbeda dari mekanisme pemidanaan bagi orang dewasa, sehingga diperlukan kajian yang mampu melihat bagaimana kebijakan hukum pidana diterapkan ketika anak berperan sebagai kurir narkotika di Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkotika dan Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai kurir narkotika.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan studi peraturan perundangan-undangan, literatur hukum, dan sumber internet lainnya yang relevan terkait kebijakan hukum pidana dan UU SPPA sebagai data sekunder, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan narasumber yaitu hakim, jaksa, polisi dan akademisi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dilengkapi dengan wawancara terhadap narasumber. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap anak yang terlibat sebagai kurir narkotika menempatkan UU SPPA sebagai *lex specialis* yang mengatur secara penuh proses peradilan anak, termasuk pembatasan ancaman pidana, penerapan diversi, serta kewajiban mengedepankan perlindungan anak. Dalam praktik di Kota Bandar Lampung, aparat memahami bahwa anak kurir merupakan pihak yang rentan dieksploitasi sehingga tidak dapat dipersamakan dengan pelaku dewasa. Kebijakan hukum pidana tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu substansi hukum yang jelas dan menjadi fondasi perlindungan

Mutiara Ratu

anak; sarana dan prasarana seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang masih perlu diperkuat; sikap masyarakat yang cenderung represif; budaya permisif terhadap narkoba di lingkungan tertentu, nilai kepatuhan anak kepada orang dewasa dan stigma sosial terhadap anak pelaku memperbesar kerentanan anak untuk dieksploitasi; serta kualitas pemahaman aparat penegak hukum yang sudah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Interaksi seluruh faktor tersebut menentukan keberhasilan penerapan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan anak dalam kasus peredaran narkoba.

Saran penelitian ini adalah diperlukan penguatan terhadap faktor sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum guna mendukung efektivitas kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba. Peningkatan kapasitas Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak penting untuk mengoptimalkan asesmen dan pembinaan anak. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma dan pendekatan represif, serta membangun budaya hukum yang berorientasi pada perlindungan anak dan pencegahan eksploitasi dalam peredaran narkoba.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Anak, Narkoba

ABSTRAC

CRIMINAL LAW POLICY ON DRUG CRIMES COMMITTED BY CHILDREN AS DRUGS COURTIERERS (A Study in Bandar Lampung City)

**By
Mutiar Ratu**

Narcotics crimes involving children have drawn particular attention in criminal law policy, as children are in a vulnerable position to influence and exploitation by illicit drug trafficking networks. The Juvenile Criminal Justice System Act (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak/UU SPPA) provides a legal framework that differs from adult sentencing mechanisms; therefore, a study is required to examine how criminal law policy is applied when children act as narcotics couriers in Bandar Lampung City. The problems addressed in this research are how criminal law policy is implemented toward narcotics crimes committed by children acting as narcotics couriers, and what factors influence the criminal law policy toward narcotics crimes committed by children as narcotics couriers.

This research employs a normative juridical approach through the study of statutory regulations, legal literature, and other relevant internet sources related to criminal law policy and the UU SPPA as secondary data. In addition, an empirical juridical approach is used by collecting primary data through interviews with key informants, namely judges, prosecutors, police officers, and academics. Data collection methods consist of literature study complemented by interviews. The data are analyzed using qualitative analysis to produce descriptive findings.

*The results of the study indicate that criminal law policy toward children involved as narcotics couriers places the UU SPPA as *lex specialis* that fully regulates the juvenile justice process, including limitations on criminal sanctions, the application of diversion, and the obligation to prioritize child protection. In practice in Bandar Lampung City, law enforcement officers recognize that child couriers are vulnerable parties who are easily exploited and therefore cannot be equated with adult offenders. Criminal law policy is influenced by several factors, namely: clear legal substance that serves as the foundation for child protection; facilities and infrastructure such as the Correctional Center (Balai Pemasyarakatan/Bapas) and the Special Child Development Institution (Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA), which still need to be strengthened; public attitudes that tend to be repressive; permissive cultures toward narcotics in certain environments;*

Mutiara Ratu

children's obedience to adults and social stigma against child offenders that increase their vulnerability to exploitation; as well as the quality of understanding among law enforcement officers who have applied the principle of the best interests of the child. The interaction of these factors determines the success of implementing policies oriented toward child protection and rehabilitation in narcotics trafficking cases.

The study recommends strengthening facilities and infrastructure, public awareness, and legal culture to support the effectiveness of criminal law policy toward children acting as narcotics couriers. Enhancing the capacity of Correctional Centers and Special Child Development Institutions is essential to optimize assessment and rehabilitation of children. In addition, legal education for the public needs to be improved to reduce stigma and repressive approaches, and to foster a legal culture oriented toward child protection and the prevention of exploitation in narcotics trafficking.

Keywords: Criminal Law Policy, Children, Narcotics